

## **LAPORAN PENELITIAN**

# **PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (FINANCIAL MANAGEMENT AS THE SUCCESS MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF REGIONAL GOVERNMENT)**



**Oleh :**

DR. Yusup Iskandar Dr. H. Yusup Iskandar, S.E.,M.M (NIDN. 0419076902)

DR. Ati Rosliyati, S.E.,M.M.,Ak.,C.A (NIDN. 0402127101)

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS GALUH  
2017**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN DENGAN PENDANAAN LPPM UNIGAL**

---

1. a. Judul Penelitian : **Pengelolaan Keuangan Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Financial Management as The Success Measurement of Financial Performance of Regional Government)**  
b. Bidang Ilmu : Manajemen

2. Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Yusup Iskandar., S.E.,M.M  
b. NIK : 03.3112770076  
c. Pangkat/Golongan : Penata / IIIc  
d. Jabatan Fungsional : Lektor  
e. Jabatan Struktural : -  
f. Fakultas / Program Studi : Manajemen  
g. Pusat Penelitian : -

3. Anggota Peneliti :

No.	Nama dan Gelar	NIK	Bidang Keilmuan	Fakultas
1	DR. Ati Rosliyati, S.E.,M.M.,Ak.,C.A.	3112770074	Akuntansi Biaya	Ekonomi

4. Lokasi Penelitian : Jawa Barat  
5. Kerjasama dengan Instansi Lain:  
a. Nama :  
b. Alamat :  
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan  
7. Biaya yang dibelanjakan : Rp. 30.000.000

Mengetahui

Dekan,



DR. Ati Rosliyati, S.E.,M.M.,Ak.,C.A  
NIK. 3112770074

Ciamis, 30 Desember 2017

Ketua,

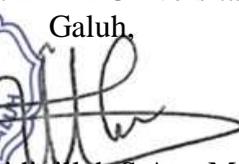


Yusup Iskandar., S.E.,M.M  
NIK. 3112770076

Menyetujui

Ketua LPPM Universitas

Galuh,



Endin Lidinillah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197406152005011005

## Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji, mengetahui dan memberi gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di priangan timur melalui optimalisasi pengelolaan Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif, metode penelitian yang digunakan *explanatory survey*.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 180 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Priangan Timur dapat meningkat dengan optimalisasi pengelolaan keuangan.

*Keyword:* Pengelolaan Keuangan, Kinerja Keuangan

## **Kata Pengantar**

Atas Rahmat dan Inayah Allah SWT, kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian dengan judul “Pengelolaan Keuangan Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Financial Management as The Success Measurement of Financial Performance of Regional Government). Maka selayaknya kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah mengelola alam semesta beserta isinya dengan sempurna.

Laporan Akhir Penelitian ini kami buat dalam upaya pertanggungjawaban pelaksanaan tri darma perguruan tinggi pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang mudah-mudahan bermanfaat secara pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan guna laksana (praktis) bagi masyarakat.

Akhir kata, kami menyadari sebagai manusia yang banyak memiliki keterbatasan dan hanya ALLAH SWT yang memiliki kesempurnaan seutuhnya. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca adalah sumbangsi yang tak terhingga nilainya.

Ciamis, 30 Desember 2017

Penulis,

## Daftar Isi

Ringkasan.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Pendahuluan.....	1
Tujuan .....	3
Metode .....	3
Hasil .....	3
a) Hasil Deskriptif .....	3
b) Hasil Verifikatif.....	6
Pembahasan.....	7
Daftar Pustaka	

## **Pendahuluan**

Kinerja keuangan pemerintah daerah masih banyak dalam kategori opini wajar dengan pengecualian, artinya belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melihat hasil temuan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan opini yang diberikan kebanyakan Wajar Dengan Pengecualian maka itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah belum optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:9) bahwa salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Berhubungan dengan pengelolaan keuangan, maka sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

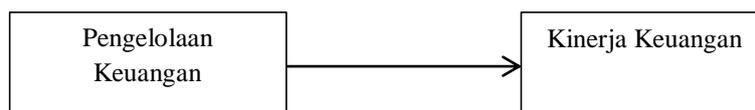
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan di Priangan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan menjelaskan hubungan kinerja keuangan dengan pengelolaan keuangan. Adapun manfaat penelitian ini untuk mengembangkan bidang ilmu manajemen mengenai pengelolaan keuangan. Manfaat untuk pemerintah Dearah yaitu dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pengelolan keuangan.

Pengelolaan Keuangan mencakup kegiatan penganggaran, penatausahaan keuangan (prosedur tata usaha keuangan penerimaan/pengeluaran kas), dan pelaporan atau prosedur akuntansi. Ahamad Yani (2013:348) mengemukakan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Suhadak (2007:136) mengatakan bahwa” masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah”. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, petanausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Indra Bastian (2006 : 274) menyatakan “kinerja keuangan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”. Sedangkan Mahsum (2006:25) menyatakan bahwa “kinerja keuangan pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi”.

Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik maka sangat ditentukan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan.

Dari kajian teori dan kerangka pemikiran tersebut dapat tergambar hubungan antar variabel yang diteliti sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Hubungan Variabel

Gambar diatas menjelaskan bahwa untuk mencapai kinerja keuangan yang baik maka sangat ditentukan oleh pengelolaan keuangan yang dilakukan. Pengelolaan keuangan yang baik harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan.

Hipotesis yang diajukan adalah pengelolaan keuangan yang optimal berpengaruh kuat terhadap kinerja keuangan.

## **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji, mengetahui dan memberi gambaran mengenai kemampuan Pemerintah Daerah di Priangan Timur dalam meningkatkan kinerja keuangan dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif, metode penelitian yang digunakan *descriptive survey* dan *explanatory survey*. *Descriptive survey* dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang variabel yang diteliti. Sedangkan *explanatory survey* untuk memperoleh gambaran keterkaitan sebab akibat antar variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi Unit analisis adalah Pemerintah Daerah dan Kota yang ada di Priangan Timur dengan unit observasinya Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 180 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mendapatkan data penelitian kuantitatif digunakan angket kepada 180 responden serta melakukan wawancara kepada expert untuk menghasilkan data kualitatif.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Jalur (*Path Analysis*) untuk menganalisis data deskriptif dan verifikatif.

## **Hasil**

### **a) Hasil Deskriptif**

Pengelolaan Keuangan diukur dengan 19 item pernyataan dengan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) perencanaan, 2) penatausahaan, 3) pertanggungjawaban dan 4) pengawasan. Seperti terlihat pada tabel 4.15 adalah hasil penelitian dari 19 item pernyataan yang diajukan untuk mengukur variabel pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang mengacu pada kuesioner, diperoleh skor rentang nilai data untuk variabel pengelolaan keuangan yang diwakili oleh 19 item pernyataan untuk 180 SKPD. Gambaran tentang tanggapan responden terhadap Variabel pengelolaan keuangan yang terdiri dari 19 item pernyataan dengan rincian frekuensi sebagai berikut: Jumlah item jawaban responden yang dinyatakan menjawab skala 1 sebesar 1,401 persen, menjawab skala 2 sebesar 0,96 persen, menjawab skala 3 sebesar 7,63 persen, menjawab skala 4 sebesar 24,89 persen, dan menjawab skala 5 sebesar 91,78 persen. Hal ini berarti bahwa data tersebut terpecah dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan nilai rata-rata

sebesar 3,326 dengan standar deviasi sebesar 0,861 dengan kategori jawaban berada pada rentang 2,465 – 4,187 dengan kriteria rendah menuju baik.

Dilihat dari rata-rata skor setiap dimensi, diketahui bahwa: 1) dimensi perencanaan memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,854 dengan kriteria cukup baik, 2) dimensi penatausahaan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,765 dengan kriteria cukup baik, 3) dimensi pertanggungjawaban memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,681 dengan kriteria cukup baik, dan 4) dimensi pengawasan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,524 dengan kriteria cukup baik.

Dari ke empat dimensi tersebut diatas dimensi perencanaan yang memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 2,854. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: item pernyataan no. 5 yaitu Dalam perencanaan diterapkan prinsip Disiplin, yaitu rencana APBD harus sudah diajukan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan sehingga perlu diperhatikan saat penyusunan dan Pengesahannya dengan nilai rata-rata sebesar 2,448, item pernyataan no.7 yaitu Dalam perencanaan diterapkan prinsip Prioritas, yaitu penyusunan anggaran diupayakan dapat mempertajam keutamaan penggunaan dana yang tersedia untuk pembiayaan program dan kegiatan dengan nilai rata-rata sebesar 2,517, item pernyataan no. 6 yaitu Dalam perencanaan diterapkan prinsip fleksibel, yaitu karena disadari bahwa anggaran pada dasarnya masih merupakan rencana sehingga dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perubahan dengan nilai rata-rata sebesar 2,810 dan item pernyataan no 2 yaitu Dalam perencanaan diterapkan prinsip komprehensif, yaitu seluruh kegiatan yang akan dilakukan dan mempunyai akibat keuangan harus dicantumkan dalam anggaran dengan nilai rata-rata sebesar 2,871.

Sedangkan dimensi yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah dimensi penatausahaan dengan nilai rata-rata sebesar 3,765. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: item pernyataan no 10 yaitu setiap belanja dicatat dalam pembukuan dengan nilai rata-rata sebesar 3,858 dan item pernyataan no. 11 yaitu setiap kekayaan daerah dicatat dalam pembukuan dengan nilai rata-rata sebesar 3,858.

Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan diukur dengan 19 item pernyataan dengan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) Kesesuaian dengan SAP, 2) Kecukupan Pengungkapan, 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) efektivitas pengendalian. Seperti terlihat pada tabel 4.16 adalah hasil penelitian dari 19 item pernyataan yang diajukan untuk mengukur variabel kinerja keuangan. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang

mengacu pada kuesioner, diperoleh skor rentang nilai data untuk variabel kinerja keuangan yang diwakili oleh 19 item pernyataan untuk 180 SKPD.

gambaran tentang tanggapan responden terhadap Variabel Kinerja keuangan terdiri dari 19 item pernyataan dengan rincian frekuensi sebagai berikut: Jumlah item jawaban responden yang dinyatakan bahwa menjawab skala 1 sebesar 1,11 persen, menjawab skala 2 sebesar 0,52 persen, menjawab skala 3 sebesar 6,89 persen, menjawab skala 4 sebesar 49,52 persen, dan menjawab skala 5 sebesar 68,63 persen. Hal ini berarti bahwa data tersebut terpecah dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan nilai rata-rata sebesar 3,343 dengan standar deviasi sebesar 0,891 dengan kategori jawaban berada pada rentang 2,452-4,234 dengan kriteria rendah menuju baik.

Dilihat dari rata-rata skor setiap dimensi, diketahui bahwa: 1) dimensi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,562 dengan kriteria cukup baik, 2) dimensi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,426 dengan kriteria cukup baik, 3) dimensi kecukupan pengungkapan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,407 dengan kriteria cukup baik, dan 4) dimensi efektivitas pengendalian intern memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,023 dengan kriteria cukup baik.

Dari ke empat dimensi tersebut diatas dimensi efektivitas yang memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 3.023. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: item pernyataan no. 18 yaitu Semua asset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah dengan nilai rata-rata sebesar 2,465, dan item pernyataan no.17 yaitu Seluruh transaksi telah diringkas secara memadai untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan nilai rata-rata sebesar 2,871.

Sedangkan dimensi yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah dimensi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dengan nilai rata-rata sebesar 3,562pat dilihat dari aspek item pernyataan no 4 yaitu Pengakuan atas unsur laporan keuangan dengan nilai rata-rata sebesar 3,858.

**Tabel 1. Kriteria Ketercapaian Skor Tiap Variabel**

Variabel	N	Mean	Std. Dev	Rentang	
Pengelolaan Keuangan	180	3,326	0,861	2,465	4,187
Kinerja Keuangan	180	3,343	0,891	2,452	4,234

Sumber: Hasil pengolahan Data

**b) Hasil Verifikatif**

Berdasarkan hasil perhitungan nilai korelasi dan koefisien jalur yang telah dilakukan, maka diperoleh derajat kontribusi dari Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan, seperti terlihat pada Tabel 4.24 berikut ini:

**Tabel 2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan**

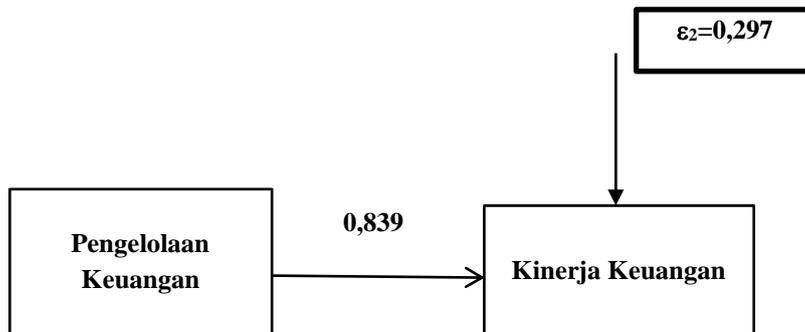
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,839 <sup>a</sup>	,703	,702	5,26396	,703	422,204	1	178	.000

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan

*Sumber: Hasil Pengolahan Data*

Hasil analisis jalur variabel Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan dapat dijelaskan pada Gambar 4.3 dibawah ini:



**Gambar 2 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan gambar 2, maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut:

$$Z = \rho_{zy} \cdot Y + \varepsilon_2$$

$$Z = 0,839 Y + \varepsilon_2$$

Dimana:

Y = Pengelolaan Keuangan

Z = Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil perhitungan nilai korelasi dan koefisien jalur yang telah dilakukan, maka diperoleh derajat kontribusi dari Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja

Keuangan yang besarnya 0,839. Sehingga semakin baik Pengelolaan Keuangan maka akan semakin baik Kinerja Keuangan dengan nilai kontribusi sebesar 0,839.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan adalah sebesar 0,703. Hal ini mengindikasikan bahwa Kinerja keuangan dipengaruhi oleh Pengelolaan Keuangan sebesar 70,3%, artinya bahwa semakin tinggi tingkat Pengelolaan Keuangan, maka akan semakin baik Kinerja Keuangan, karena dengan tingkat Pengelolaan Keuangan yang tinggi akan tercipta Kinerja Keuangan yang baik

## **Pembahasan**

### **Pengelolaan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengolahan data deskriptif bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Daerah berada pada kriteria rendah menuju baik. Pengukuran Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah merujuk pada teori Ahmad Yani (2013:348) dengan empat dimensi yaitu 1) perencanaan, 2) penatausahaan, 3) pertanggungjawaban dan 4) pengawasan.

Jika dilihat dari rata-rata skor setiap dimensi, diketahui bahwa: 1). Dimensi perencanaan dengan kriteria cukup baik, 2) dimensi penatausahaan dengan kriteria cukup baik, 3) dimensi pertanggungjawaban dengan kriteria cukup baik dan 4) dimensi pengawasan dengan kriteria cukup baik. Diantara ke empat dimensi tersebut yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi terletak pada dimensi penatausahaan sedangkan dimensi terendah terletak pada dimensi perencanaan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa aspek dalam perencanaan masih rendah yaitu penerapan prinsip disiplin masih kurang dilaksanakan, rencana APBD belum tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, penerapan prinsip prioritas dalam penyusunan anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan, begitu juga dalam prinsip fleksibel dan komprehensif belum sepenuhnya dilaksanakan.

Hal serupa diungkapkan oleh expert judgment Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si, bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan itu masih rendah. Menurut beliau ada beberapa alasan yang menjadi penyebabnya, adalah: 1) tidak konsistennya antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dengan perencanaan nasional, 2) DPRD selalu minta jatah diluar perencanaan dengan alasan aspirasi masyarakat, dan 3) perencanaan yang dibuat tidak berdasarkan kebutuhan tetapi berdasarkan keinginan. Sedangkan menurut Dr. Iwan Saputra, M.M, bahwa rendahnya perencanaan disebabkan karena dalam perencanaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip 3 E ( Efisien, Ekonomis dan Efektif). Selain itu adanya ketidak pahaman terhadap aturan.

## Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data deskriptif bahwa variabel Kinerja Keuangan berada pada kriteria cukup baik. Pengukuran Variabel Kinerja Keuangan merujuk pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 terdiri dari empat dimensi, yaitu: 1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, 2) Kecukupan pengungkapan, 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 4) efektivitas pengendalian Intern.

Gambaran variabel kinerja keuangan daerah hasil penelitian tersebut secara keseluruhan dari responden mengapresiasi kinerja Keuangan Daerah berada pada kategori cukup baik, dapat dilihat dari: 1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari komponen laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan di buat berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan laporan keuangan berdasarkan atas unsur laporan keuangan, 2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat bahwa laporan keuangan disusun sebagai implementasi dari undang-undang dan peraturan perundangan lain yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan, 3) kecukupan pengungkapan, hal ini dapat dilihat dengan adanya pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dari hasil pengolahan data, untuk variabel kinerja keuangan dimensi yang tertinggi terletak pada dimensi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, sedangkan dimensi terendah terletak pada dimensi efektivitas pengendalian intern. Aspek yang masih rendah terletak pada: aset belum dilindungi sepenuhnya dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah serta seluruh transaksi belum diringkas secara memadai untuk penyusunan laporan keuangan. Seperti yang dikemukakan oleh *expert judgment* yaitu Dr. Iwan Saputra, MM, bahwa rendahnya efektivitas pengendalian diantaranya disebabkan karena tidak menguasai aturan-aturan keuangan sehingga sering menjadi temuan, penatausahaan aset yang belum dikelola dengan baik yang mengakibatkan adanya aset-aset yang sulit untuk ditelusuri sehingga mengakibatkan adanya perbedaan nilai aset yang tercantum dalam neraca dengan buku inventaris.

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil pengamatan, analisis dan wawancara dengan beberapa kepala SKPD dimana kelemahan sistem pengendalian intern tersebut dikarenakan oleh: a) perencanaan kegiatan tidak memadai, b) penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, c) penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilaksanakan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, d) mekanisme

pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan, e) penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja, dan f) pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD. Dari kelemahan tersebut mengakibatkan masih banyak pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah masih belum optimal.

## **Kesimpulan**

Kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah priangan timur masih banyak yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) sehingga berusaha untuk meningkatkannya dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Dengan kinerja keuangan yang meningkat melalui pengelolaan keuangan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan harus konsisten antara perencanaan jangka panjang, jangka pendek dan perencanaan nasional, perencanaan harus dibuat berdasarkan kebutuhan, serta dalam membuat perencanaan harus menerapkan prinsip efisien, ekonomis dan efektif.

Saya ucapkan terima kasih kepada para kepala SKPD yang telah memberikan informasi dan data untuk penelitian ini. Serta Prof. Dr. Sadu Wasisto, M.Si sebagai staff ahli pemerintahan dan Ir. Cornell Syarif Prawiradiningrat, M.M sebagai kepala BPK yang telah bersedia sebagai expert judgment sehingga hasil penelitian ini lebih akurat. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada DR. Yat Rospia Brata, M.Si sebagai Rektor Universitas Galuh Ciamis.

## Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul, Hakim, 2006. Distorsi Sistem Pemberhentian (*Impeachment*) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung, Toga Press, Yogyakarta.
- Aristovnik A. 2012. *Fiscal Decentralization in Eastern Europe: Twenty-Year Perspective*. University of Ljubljana, Slovenia.
- Austin, R, Kenneth, Robbins.A. Walter. 2010. *Disclosure quality in Governmental Financial Reports: an Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure*. Journal of accounting Research, Booth School of Business, university of Chicago.
- Aswin, HM. 2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Kota dengan Pendekatan Balanced Scorecard. Disertasi. Universitas Brawijaya.
- Bateman, TS, dan Snell, SA, 2008, *Management: Leading and Collaborating in Competitive World, 7 th Edition*. Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia Persaingan, Edisi 7 Penerjemah: Chriswan Sungkoro dan Ali Akbar Yulianto, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Batubara, A. H, 2006. Konsep *Good Governance* Dalam Konsep Otonomi Daerah. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan. Vol. 3, No, 1.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan, 2008. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu sosial Lainnya, Kencana Prenadana Media Group Jakarta.
- Boadway, Robin & Shah, Anwar. 2007. Local Public Financial Management. The World Bank. Washington D.C.
- Boediono, 2002, Menkeu, Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002, Jakarta, 11 Pebruari
- Brodjonegoro, Bambang dan Arlen T. Pakpahan. 2002. Evaluasi atas Alokasi DAU 2001 dan Permasalahannya. Dalam Machfud Sidik, dkk. 2002. Dana Alokasi Umum, Jakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Cnossen, Sijbren & Hans-Werner Sinn. 2003. *Public Finance and Public Policy in the New Century*, MIT Press, Cambridge, London.
- Chaizi Nuscha, 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Dabla-Norris, Era, & Paul Wade, 2002, *The Challenge of Fiscal Decentralization in Developing Countries*, IMF Working Paper, Washington D.C. International Monetary Fund.
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi kedua. PT. Indeks. Jakarta.
- Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. 2012. Analisis Tren Pendapatan dan Belanja. DJPK. Jakarta.

- Dimock, Marshal Edward and Gladys Ogden Dimock.2005.. *Administrasi Negara*. Alih Bahasa: Husni Thamrin Pane. Cetakan Kelima.. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus, dkk.,2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- George, Jennifer M., Gereth R. Jones, 2006, *Contemporary Management Creating Value In Organization*, McGraw Hill Irwin Inc, New York.
- Gordon, Judith R., 2006. *Organizational Behavior: A Diagnostic Approach*, New Jersey. Prentice Hall Inc.
- Hyman, N, David. 2010. *Public Finance* 10th Edition, North Caroline State University South Western Cengage Learning.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta : Salemba Empat.
- Hakim, Abdul.2006. *Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, UGM.
- Hastono, Dimas. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Efisiensi Pendapatan asli Daerah pada Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pati. Disertasi. Universitas Muria Kudus.
- Ivancevich, J.M., Konopaske, R.J. dan Matteson, M.T. 2006. *Organizational Behavior and Management* 7 th Edition. Alih Bahasa: Gina Gania, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Imawan, Riswanda, 2005. *Desentralisasi, Demokratisasi dan pembentukan Good Governance*. Dalam Syamsudin Haris (Editor), *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2010. Implikasi Desentralisasi Fiskal dan *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Provinsi Bali). Disertasi. Universitas Brawijaya.
- Kadajatmiko, 2004. Transfer Antar Tingkat Pemerintahan ( *Intergovernmental Transfer*) dalam Machfud Sidik, dkk. Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal. Jakarta: Direktorat Jemderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan RI.
- Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., Ho, Tsai-Neng. (2010). Applying integrated DEA/AHP to evaluate the economic performance of local governments in China. *European Journal of Operational Research*, 209(2011) 129—140
- Mardiasmo. 2004. *Serial Otonomi Daerah: Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Ed II, Penerbit Andi, Yogyakarta. Edisi Khusus.
- Malinowski, Hopkins, A.A., D.P. H. Zhang, and D.W. Walker. 2003. Russian Wddrye Seedling are Sensitive to Acid Soil. *Crop Sd.* 44: 2187-2192.
- Mahsun, Mohammad ( 2006 ), *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mahmudi (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

- Muchamad, Syafruddin, (2006). *Dampak Struktur Kekuasaan Pada Penggunaan SIKD Untuk Kontrol Keputusan Dan Manajemen Keputusan dan Perilaku Manajerial : Studi Pada Organisasi Pemerintah Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus 2006
- Meuthia Ganie Rahman,2000. “*Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya*” dalam *Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik )*,Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- Petersen, E., John, Ebel, D. Robert. *The Oxford Handbook of State and Local Government Finance*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-976536-2.
- Rosen, Harvey S. 2002. *Public finance* (Sixth Edition), McGraw Hill. New York.
- Rohman, Abdul (2007). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah). *jurnal MAKSI*. Vol.7 No.2. Hal. 105-220, Agustus 2007.
- Treisman D. 2002. *Decentralization and The Quality of Government*. University of California, Los Angeles.
- Weiss, Thomas G.2010). *Governance, Good Governance and Global Governace: Conceptual and Actual Challenges*.Third World Quarterly Journal, Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number:1072954, London.